

## Strategi Pemberdayaan Wanita Nelayan Asli Papua Di Kabupaten Biak Numfor

Salehuddin<sup>1</sup> & Edyanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Sosiologi, IISIP YAPIS Biak Papua

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, IISIP YAPIS Biak Papua

[salehuddinalan@gmail.com](mailto:salehuddinalan@gmail.com), [edypapua10@gmail.com](mailto:edypapua10@gmail.com)

DOI: 10.32699/resolusi.v6i1.3752

Submitted: 2022-12-09, Revised: 2022-12-14, Accepted: 2022-12-20

### Abstrak

Pemberdayaan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di Kabupaten Biak Numfor serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengeksplorasi strategi pemerintah dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di Kabupaten Biak Numfor dengan melalui observasi dan wawancara, melalui penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan strategi dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam pemberdayaan wanita nelayan asli Papua di kabupaten Biak Numfor dilakukan melalui; penyediaan sarana dan prasarana home industri, pemberian pelatihan keterampilan olahan ikan, dan pembentukan kelompok ibu-ibu nelayan. Disamping itu, terbatasnya anggaran dan kesadaran masyarakat yang masih kurang merupakan faktor penghambat dalam pemberdayaan wanita nelayan asli Papua di kabupaten Biak Numfor.

**Kata kunci:** pemberdayaan wanita, nelayan wanita, Papua

### Abstract

Empowerment is a series of activities carried out by the government to strengthen the empowerment of weak groups in society, including individuals who experience poverty. Empowerment refers to the circumstances or results to be achieved by social change, namely empowered people who have the knowledge and ability to fulfill their physical, economic, and social needs. This study aims to determine the strategies for empowering indigenous Papuan women fishermen in Biak Numfor Regency and to find out the factors that become obstacles in empowering indigenous Papuan women fishermen in Biak Numfor Regency. This research uses a qualitative descriptive approach that explores the government's strategy in empowering indigenous Papuan women fishermen in Biak Numfor Regency through observation and interviews. Through this research it is hoped that it will be able to describe strategies in empowering indigenous Papuan women fishermen in Biak Numfor Regency. Based on the results of the research, it shows that the strategy for empowering indigenous Papuan fisherwomen in the Biak Numfor district is carried out through; provision of home industry facilities and infrastructure, training in fish processing skills, and forming groups of fishermen's mothers. Besides that, the limited budget and lack of public awareness are the inhibiting factors in empowering indigenous Papuan fisherwomen in the Biak Numfor district.

**Keywords:** women empowerment, women fishermen, Papua

## **Pendahuluan**

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah di era otonomi daerah adalah memaksimalkan peran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan kemampuan orang, khususnya kelompok masyarakat yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam artian bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya (Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, 2013). Lebih lanjut, menurut Firmansyah & Pratiwi, Ratih Nur (2014) otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengoptimalkan segala potensi terbaiknya, karena setiap daerah pasti memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu. Hakikatnya, pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri, seperti kemandirian berfikir, kemandirian bertindak, memutuskan apa yang akan dilakukan (Safri Miradj, 2014). Kebijakan pemerintah di masa orde baru belum optimal dalam mengentaskan kemiskinan disebabkan karena banyaknya pihak pemerintah yang masih mementingkan pembangunan di ibukota sehingga masih sangat banyak sekali dilihat kemiskinan dimana-mana, ditambah dengan tindakan korupsi yang terjadi. Hal tersebut sangat merugikan keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk membangun terutama untuk daerah yang terdepan, terluar dan tertinggal (Ras, 2013).

Menurut Hanna dan Robinson dalam (Suryadi & Sufi, 2019) ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan social, yaitu tradisional, aksi langsung, dan transformasi. Konsep pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan memberi kesadaran akan kebebasan setiap orang. Melalui pemberdayaan, potensi yang terpendam yang dimiliki masyarakat akan terlihat (Musa, 2017). Lebih lanjut, menurut Irwan et al., (2017) pemberdayaan yaitu proses sosial yang terencana untuk memberikan atau mengalihkan sebagian kemampuan kepada masyarakat serta menstimulasi/memotivasi individu agar mereka memiliki keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Secara umum masyarakat Papua hidup sederhana (Iriawan & Edyanto, 2022), menurut Lopulalan (2018) orang asli Papua merupakan orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Sebutan orang asli Papua melekat dengan istilah masyarakat hukum adat yang menggambarkan jati diri orang asli

Papua itu sendiri termasuk dalam kontestasi pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua. Istilah orang asli Papua sering diartikan menjadi garis keturunan laki-laki atau Patrilineal dari rumpun ras Melanesia yang ada di wilayah Papua, pada umumnya masyarakat adat Papua mewarisi fam atau marga dari ayahnya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Bab 1, Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi antara anggotanya. Sesuai konsensus bersama, orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli Papua dan/ atau yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat hukum adat Papua.

Sebagian besar wilayah perairan Kabupaten Biak Numfor berada di pinggirannya samudera Pasifik terdiri atas lautan dan memiliki potensi kelautan cukup besar, dengan potensi sumber daya kelautan yang dimiliki kabupaten Biak Numfor, seharusnya kehidupan nelayan Papua sejahtera. Akan tetapi, dalam kenyataan keseharian, nelayan yang menggantungkan hidup pada potensi kelautan itu masih hidup miskin. Menurut Sugiharto dalam (Sinaga, 2019) bahwa kantong-kantong kemiskinan pada dasarnya masih terdapat pada kelompok masyarakat nelayan. Selanjutnya, penyebab kemiskinan nelayan tersebut menurut Kusnadi dalam (Sinaga, 2019) dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks seperti fluktuasi musim ikan, keterbatasan sumberdaya manusia, modal dan akses, jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap terhadap nelayan sebagai produsen, modernisasi perikanan yang mendorong terjadinya pengurasan sumberdaya laut secara berlebihan.

Adapun permasalahan yang dihadapi nelayan asli Papua di kabupaten Biak Numfor, yaitu kemampuan peralatan tangkap yang masih terbatas akan tetapi obsesi untuk mengeksport ikan sangat tinggi, banyak produk yang dihasilkan oleh wanita nelayan asli Papua namun tidak pernah digarap serius hingga menjadi entrepreneurship (Muhsidin, 2022). Oleh karena itu diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui strategi yang lebih tepat untuk diterapkan dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat program pemberdayaan masyarakat nelayan.

## **Tinjauan Pustaka**

Menurut Christofer Ondang, Frans Singkoh, (2019) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya untuk didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Menurut Setiawan (2020) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pemberdayaan nelayan kecil yaitu faktor teknis, kultural, dan struktural. Menurut Hermanto (2017) pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat nelayan adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri, sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Menurut Hanson dalam (Sinaga, 2019) mengemukakan bahwa masyarakat pesisir memiliki kehidupan yang khas, yang dihadapkan langsung dengan keadaan ekosistem yang keras, dan sumber kehidupan yang tergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut. Istilah masyarakat pesisir sering diidentikkan dengan masyarakat nelayan, ini disebabkan karena mayoritas dari pekerjaan masyarakat pesisir adalah nelayan (Suryadi & Sufi, 2019). Menurut Suharto dalam (Suryadi & Sufi, 2019) masyarakat nelayan adalah masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan menggantung hidup mereka dilaut. Masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam upaya menyajikan pemahaman yang menyeluruh maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena peneliti di sini berusaha menggambarkan fakta-fakta tentang strategi dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 1 orang wanita asli Papua yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan di Kabupaten Biak Numfor dan 2 orang informan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor. Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik, *purposive sampling*. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain; Observasi secara langsung tentang strategi dalam pemberdayaan wanita nelayan asli Papua di Kabupaten Biak Numfor.

Selanjutnya wawancara tatap muka secara langsung untuk menggali informasi yang lengkap dan detail dari informan. Di samping itu, analisis data dalam Penelitian ini adalah menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

### **Strategi Pemberdayaan Nelayan Wanita Asli Papua di Kabupaten Biak Numfor**

Upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang mempunyai, latar belakang, dan budaya tertentu. Upaya pemberdayaan pada masyarakat juga memiliki cara yang berbeda atau tidak sama. Salah satu sasaran dari pemberdayaan masyarakat nelayan di kabupaten Biak Numfor adalah peningkatan pendapatan masyarakat nelayan, hal tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa disamping kawasan pesisir kabupaten Biak Numfor menyimpang potensi sumber daya alam yang cukup besar, juga memiliki potensi sosial masyarakat untuk mengelola potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Salah satu potensi sosial masyarakat nelayan adalah wanita nelayan, terkhusus untuk daerah kabupaten Biak Numfor adalah nelayan wanita asli Papua. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan di kabupaten Biak Numfor pada umumnya berada pada kondisi sosial ekonomi yang rendah. Salah satu alasan utama yang mendorong wanita nelayan asli Papua untuk bekerja adalah faktor ekonomi, di mana pendapatan yang diberikan oleh suami dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Untuk mengetahui strategi dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di kabupaten Biak Numfor, maka peneliti melakukan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di kabupaten Biak Numfor diperoleh informasi bahwa ada beberapa strategi dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di kabupaten Biak Numfor, diantaranya;

#### ***Penyediaan Sarana Prasarana Home Industri***

Menurut Widjajanti (2011) keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Pada umumnya kawasan pesisir kabupaten Biak Numfor dihuni oleh masyarakat yang mata pencaharian pokoknya adalah nelayan. Disamping itu, peneliti juga melihat bahwa keluarga nelayan asli Papua tidak sedikit yang hidupnya jauh dari kata sejahtera atau berada dalam kondisi yang tergolong miskin. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, pendapatan sebagai nelayan tergantung pada perubahan iklim dan cuaca yang kadang tidak

pernah menentu yaitu apabila cuaca buruk menyebabkan nelayan tidak bisa turun untuk melaut sehingga tidak mampu menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, disamping itu pendapatan nelayan yang bersifat harian membuat wanita nelayan sulit untuk merencanakan penggunaan pendapatan. Oleh karena itu, pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di kabupaten Biak Numfor melalui *home industri* diharapkan mampu meringankan beban suami dalam mencari nafkah, mampu menggerakkan denyut ekonomi sosial masyarakat asli Papua terutama mampu meningkatkan kualitas nelayan wanita asli Papua agar menjadi wanita yang produktif dalam meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga mereka. Lebih lanjut, menurut Hermanto (2017) kegiatan ekonomi tambahan yang dilakukan oleh anggota keluarga nelayan merupakan bagian dari strategi adaptasi untuk melangsungkan kehidupan mereka.

Penyediaan sarana prasarana *home industri* yang dilakukan pemerintah di Kabupaten Biak Numfor dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dalam hal ini pemberdayaan nelayan wanita asli Papua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Pemberdayaan akan melibatkan beberapa unsur antara yang satu dengan unsur yang lain. Pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di kabupaten Biak Numfor merupakan proses kesadaran dalam pembentukan kapasitas wanita asli Papua. Menurut Mastika (2018) dalam industri kreatif menuntut adanya ide-ide dan solusi, industri memerlukan kemampuan ide dari sumber daya manusia.

Strategi pemberdayaan salah satu hal yang sangat membantu dalam melakukan perubahan, utamanya dalam hal peningkatan ekonomi keluarga. Kegiatan nelayan wanita asli Papua di kabupaten Biak Numfor selain membantu keluarga dalam melaut juga mengurus rumah tangga. Dengan adanya penyediaan *home industri* maka diharapkan juga wanita asli Papua di kabupaten Biak Numfor mengelola suatu industri yang dapat dijadikan sebagai keahlian dan nantinya dapat memberikan pendapatan tambahan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan EP merupakan kepala seksi kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa:

"..... Selama ini kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor setiap tahun melakukan pemberdayaan nelayan terutama nelayan asli Papua, setelah ikannya tiba di darat kami bantu juga mulai dari pengolahan, pengemasan sampai pada pemasaran, kalau bapak-bapak mereka yang cari ikan di laut biasanya istrinya yang menjual langsung di pasar. Ada juga kami bantu dengan penyediaan alat pengolahan ikan yang biasanya ikan diolah menjadi ikan asar atau abon ikan ini yang banyak kami lakukan. Pemberdayaan ini dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat asli Papua". (Hasil wawancara 19 September 2022).

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan informan D yang merupakan staf dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa:

".....Kalau pemberdayaan sudah lama kami lakukan terutama pengolahan ikan untuk diolah menjadi abon ikan kami sediakan fasilitas mulai dari alatnya, cara menggunakannya, bahkan sampai pada pemasaran pun kami dari dinas senantiasa mendampingi, tentu yang banyak aktif dalam *home industri* ini adalah wanita karena suami atau bapak-bapak kebanyakan melaut". (Hasil wawancara 19 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan wanita nelayan asli Papua DK mengemukakan bahwa:

".....Bagi saya sebagai nelayan kecil bantuan yang diberikan pemerintah sangat bermanfaat dan membantu kami. Secara pribadi saya sangat berterima kasih kepada pemerintah atas kepeduliannya kepada nelayan". (Hasil wawancara 20 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor melalui seksi kenelayanan telah melakukan penyediaan sarana-prasarana *home industri* bagi wanita nelayan asli Papua. Lebih lanjut, penyediaan sarana prasarana *home industri* berupa penyediaan *cool box* dan *freezer* untuk mengawetkan hasil tangkapan nelayan, karena hasil tangkapan nelayan yang melimpah tidak semuanya dijual akan tetapi sebagiannya diawetkan untuk diolah menjadi industri olahan ikan. Perlu diketahui bahwa seperti pada umumnya seorang wanita asli Papua memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangganya, adapun untuk kebutuhan mencari nafkah merupakan kewajiban laki-laki. Akan tetapi dengan adanya *home industri* ini maka bisa menjadi bisnis sampingan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan nantinya tidak hanya bergantung pada penghasilan suami, selain itu juga mampu meringankan beban suami dalam mencari nafkah.

Dengan adanya keterlibatan wanita dalam membantu perekonomian keluarga dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi permasalahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam hal ini pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di kabupaten Biak Numfor melalui penyediaan *home industri* diharapkan mereka tidak lagi turun ke laut untuk mencari ikan melainkan mereka mampu mengelola hasil tangkapan suami mereka menjadi produk yang bernilai ekonomi, sehingga hasil perikanan yang awalnya dijual dalam bentuk ikan mentah menjadi produk olahan rumah yang lebih bervariasi untuk dijual. Hal tersebut diharapkan mampu membuat nelayan wanita asli Papua memanfaatkan waktunya untuk tetap produktif meskipun tidak turun untuk melaut.

Menurut Aflandari et al (2018) pemberdayaan wanita nelayan sangat diperlukan untuk membantu ekonomi keluarga, bisa menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi produktif yang fungsinya dari ibu rumah tangga biasa menjadi pencari nafkah seperti melakukan kegiatan *home industri* atau kegiatan pengolahan ikan dari rumah. Lebih lanjut, sarana dan prasarana penunjang usaha merupakan urat nadi dari kegiatan suatu usaha/bisnis, ketersediaan sarana prasarana pendukung sangat mempengaruhi berkembangnya usaha perikanan (Salatan et al., 2018).

### ***Pemberian Pelatihan Keterampilan***

Pada umumnya proses pemberdayaan dilakukan secara kolektif, pemberdayaan mampu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri masyarakat (Ras, 2013). Konsep pemberdayaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang menekankan pada unsur manusia sebagai subjek pembangunan (Iriawan & Edyanto, 2022). Pengembangan kapasitas masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumber daya manusia adalah perwujudan dari pemberdayaan masyarakat (Agustini & Adikampana, 2014). Melihat kenyataan masih lemahnya posisi sebagian besar wanita nelayan asli papua yang ditunjukkan dengan kurangnya akses mereka terhadap informasi dan teknologi olehnya itu sangat diperlukan pemberdayaan masyarakat. Kelemahan terhadap akses informasi dan teknologi salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh wanita nelayan asli Papua. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan.

Upaya untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada wanita nelayan dengan memanfaatkan sumber daya laut yang tersedia terutama ikan merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi mereka dalam upaya meningkatkan pendapatan dan menambah penghasilan keluarga nelayan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat nelayan asli Papua di kabupaten Biak Numfor. Wanita nelayan asli Papua diharapkan mampu ambil bagian dalam menambah pendapatan keluarga, karena selain menjalankan peran dalam rumah tangga, wanita nelayan asli papua diharapkan juga memiliki peran sosial kemasyarakatan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan wanita nelayan asli Papua dilakukan melalui pelatihan diversifikasi produk olahan berbahan baku ikan. *Output* yang diharapkan dari kegiatan pemberian pelatihan adalah agar wanita nelayan asli Papua memiliki pengetahuan secara teknis maupun manajemen mengenai diversifikasi pengolahan ikan laut, pengelolaan usaha, serta proses pengemasan hasil produk olahan ikan. Hasil dari

pemberian pelatihan diharapkan dapat dilaksanakan sehingga mampu meningkatkan ekonomi keluarga serta dapat membuka lapangan kerja baru bagi wanita nelayan asli Papua di wilayah kabupaten Biak Numfor. Selain itu diharapkan wanita nelayan asli Papua mampu menjadi wirausaha yang mandiri dan turut mengentaskan kemiskinan yang ada di sekitarnya.

Hasil wawancara dengan informan EP yang merupakan kepala seksi kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa;

".....Pada dasarnya kami telah lakukan pendampingan. Kami dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan setiap tahun memberi pendampingan pelatihan untuk pengolahan hasil tangkapan ikan namun itu dilakukan bergiliran tiap Distrik di kabupaten Biak Numfor. Pelatihan kami berikan karena kami melihat sangat perlu untuk dilakukan agar tangkapan ikan yang berlimpah ini tidak hanya dijual dalam bentuk mentah tapi dijual dalam bentuk yang lebih bervariasi. Memang ada pelatihan-pelatihan kami berikan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya nelayan". (Hasil wawancara 19 September 2022).

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan informan D yang merupakan staf dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa:

".....Pelatihan dan pendampingan setiap tahun kami laksanakan dari dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor kami lakukan selama berbulan-bulan. Seperti contoh, minggu pertama pelatihan pembuatan ikan asar, setelah itu setiap minggu pihak kami datang untuk mendampingi proses produksi bahkan sampai pada proses pemasaran. Pelatihan pengolahan hasil ikan sangat dibutuhkan karena tangkapan ikan sangat banyak, maka adanya pelatihan ini sangat membantu untuk produksi hasil olahan ikan". (Hasil wawancara 19 September 2022).

Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pelatihan pengolahan hasil ikan setiap tahun dilakukan oleh pihak dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor. Disamping itu, wanita nelayan asli Papua sangat membutuhkan pelatihan dalam pengolahan hasil tangkapan ikan sebagai nilai tambah bagi produk ikan olahan. Disamping itu, peneliti melihat bahwa ada beberapa alasan diperlukan pelatihan diversifikasi produk olahan ikan yaitu; jumlah keluarga maupun nelayan wanita asli Papua di kabupaten Biak Numfor cukup banyak, menghindarkan nelayan dari cara pengolahan ikan yang menggunakan zat berbahaya bagi manusia, adanya ketersediaan bahan mentah (ikan) yang cukup banyak sehingga mampu menjamin keseimbangan produk ikan hasil olahan.

Upaya peningkatan kualitas hidup nelayan wanita asli Papua melalui penguasaan pengetahuan, keterampilan, peningkatan status dan kemandirian wanita menjadi sasaran utama pemberdayaan wanita asli Papua agar mampu memanfaatkan lebih optimal sumber daya yang ada di sekitarnya terutama hasil laut. Pada pemberdayaan wanita nelayan asli Papua diharapkan dalam mengelola hasil ikan dapat membangun ekonomi masyarakat

nelayan asli Papua dan nantinya mampu menciptakan inovasi berbagai macam olahan dan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu ketergantungan kepada agen dan juragan ikan. Dengan adanya pelatihan diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran nelayan wanita untuk mengelola hasil ikan menjadi berbagai macam olahan. Nelayan diharapkan memiliki kesadaran jika suami mereka pergi melaut maka wanita nelayan dapat membantu dengan mengolah hasil tangkapan ikan menjadi berbagai macam olahan, seperti abon, kerupuk dan produk olahan ikan lainnya. Selanjutnya, setelah pengolahan ikan maka dapat dipasarkan di pasar tradisional dan pasar modern di kabupaten Biak Numfor. Disamping itu, untuk pemasaran dapat juga dipasarkan melalui media sosial.

Menurut Salatan et al. (2018) pelatihan pengolahan diversifikasi ikan sangat akan memiliki dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian di kawasan pesisir. Lebih lanjut, pemberian pelatihan akan sangat bermanfaat bagi nelayan dan akan mendatangkan keuntungan tambahan bagi keluarga demi pengembangan kawasan pesisir (Hasim, 2021).

### *Pembentukan Kelompok Wanita Nelayan*

Pembentukan kelompok nelayan wanita asli Papua sangat penting untuk dilakukan dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan proses pemberian pelatihan dalam inovasi hasil tangkapan nelayan. Menurut (Irwan et al., 2017) pembentukan kelompok nelayan akan mampu menjadi wadah yang menyatukan mereka sehingga mereka memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah secara bersama. Pembentukan kelompok nelayan wanita asli Papua dapat mengembangkan dirinya, mampu memberikan kemudahan kelompok nelayan untuk mendapatkan akses permodalan dan pasar. Kelompok nelayan wanita asli Papua perlu diberikan penguatan, bimbingan, dan pendampingan dari pemerintah. Hal tersebut bertujuan agar kelompok nelayan wanita asli Papua dapat mandiri baik dalam menjalankan kegiatan usahanya maupun dalam mengalami kesulitan akses permodalan maupun pemasaran.

Hasil wawancara dengan informan EP merupakan kepala seksi kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa;

“.....Jadi begini kelompok nelayan ada 2 yaitu kelompok nelayan bapak-bapak dan kelompok nelayan untuk ibu-ibu. Kelompok nelayan ibu-ibu inilah yang merupakan kelompok pengolah hasil tangkapan nelayan bapak-bapak. Adapun hasil olahan kelompok ibu-ibu dalam bentuk ikan asar dan abon ikan. Kelompok ibu-ibu nelayan terbentuk inilah yang kami lakukan pelatihan dan pendampingan”. (Hasil wawancara 19 September 2022).

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan informan D yang merupakan staf dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa:

“.....Kalau kelompok ibu-ibu nelayan sudah banyak terbentuk, kelompok ibu-ibu nelayan inilah yang mengolah hasil tangkapan suami mereka. Kelompok ibu-ibu juga yang memasarkan hasil olahan ikan di pasar. Pendampingan untuk kelompok ibu-ibu biasanya dilakukan berbulan-bulan, biasanya setelah diadakan pelatihan maka setiap pekan kami pantau perkembangannya seperti bagaimana hasil produksi dan juga berapa hasil pendapatannya. Jadi intinya sudah banyak kelompok ibu-ibu nelayan yang dibentuk Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor”. (Hasil wawancara 19 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa pihak Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor sudah membentuk kelompok nelayan sebagai salah satu cara dalam pemberdayaan nelayan asli Papua. Adapun kelompok nelayan yang dibentuk ada 2 yaitu, kelompok nelayan bapak-bapak dan kelompok nelayan ibu-ibu. Kelompok nelayan ibu-ibu inilah yang merupakan kelompok pengolah hasil tangkapan nelayan bapak-bapak/ suami mereka. Pemerintah dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan kabupaten Biak Numfor memiliki kewenangan untuk memberikan pembinaan kelompok wanita nelayan asli papua.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pembentukan nelayan didasari atas tujuan untuk menjadi wadah pembelajaran, bertukar informasi bagi para nelayan khususnya nelayan wanita asli papua. Di samping itu, kelompok nelayan ibu-ibu menjadi wadah untuk mendapatkan akses pemasaran hasil olahan bahkan menjadi wadah mendapatkan permodalan dari koperasi nelayan yang juga dibentuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor.

Menurut Salatan et al. (2018) kelompok nelayan akan menjadi pendorong bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara berkelompok. Lebih lanjut, dengan adanya kelompok nelayan akan mewakili para nelayan untuk bernegosiasi dengan siapapun, dengan organisasi apapun saja, termasuk tatkala harus berhadapan dengan pemerintah dalam upaya menyelesaikan suatu permasalahan (Irwan et al., 2017).

## **Faktor Penghambat**

### ***Keterbatasan Anggaran***

Setiap pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa membutuhkan anggaran (Irwan et al., 2017). Anggaran sangat penting dalam program pemberdayaan masyarakat (Aflandari et al., 2018). Pengadaan sarana dan prasarana pasti membutuhkan

anggaran (Salatan et al., 2018). Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi di masa yang akan datang serta seluruh kegiatan untuk jangka waktu tertentu.

Berbicara mengenai anggaran dapat dikatakan bahwa untuk memudahkan dan memperlancar setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor. Anggaran dalam pelaksanaan pemberdayaan nelayan wanita asli Papua diperoleh dari dana pusat, dari pemerintah provinsi dan juga berupa sumbangan pihak ketiga yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu faktor penghambat yang dikeluhkan dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di kabupaten Biak Numfor adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan pemerintah. Keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan pemberdayaan tidak berjalan dengan baik, berdasarkan hasil wawancara dengan informan EP merupakan kepala seksi kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa;

“..... Jadi perlu diketahui bahwa dana Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor itu terbatas. Seperti dana otonomi khusus (otsus) itu Cuma satu kali dalam satu tahun jadi pemberdayaan yang kami lakukan itu juga terbatas. Jadi mudah-mudahan dengan adanya penelitian ini kami berharap bahwa pemerintah pusat mengetahui bahwa dana yang tersedia di Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor itu terbatas dan nantinya pemerintah pusat bisa memberikan bantuan dana yang lebih banyak. Jadi paling penting itu dikasih masuk bahwa anggaran yang masih kurang”. (Hasil wawancara 19 September 2022).

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan informan D yang merupakan staf dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa:

“.....Jadi perlu diketahui dana yang tersedia itu sangat terbatas. Apalagi kabupaten Biak Numfor ini terdiri dari daerah kepulauan yang jaraknya sangat luas, seperti di pulau Numfor dan kepulauan Padaido, tentu membutuhkan anggaran biaya yang banyak untuk melakukan kegiatan disana dan juga tidak mungkin untuk menjangkau semuanya. Mudah-mudahan ada tambahan anggaran dari pemerintah pusat”. (Hasil wawancara 19 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa anggaran yang tersedia pada Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor itu terbatas untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu, wilayah kabupaten Biak Numfor yang luas dan terdiri dari daerah kepulauan dan memiliki jarak antar pulau yang jauh sehingga membutuhkan anggaran yang banyak. Menurut Misno (2015) keberadaan dari anggaran untuk pembangunan sangat diperlukan untuk mempercepat laju pembangunan, namun demikian dari besaran anggaran perlu di tentukan skala prioritasnya.

### *Kesadaran Masyarakat*

Pemberdayaan masyarakat tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa adanya partisipasi dan keikutsertaan dari masyarakat sehingga pemberdayaan tersebut berhasil guna (Edyanto, Karsiman, 2019). Disamping itu, diperlukan membangun jiwa masyarakat agar mereka mampu menyesuaikan dan pikiran serta tindakannya dengan perkembangan yang terjadi serta memiliki rasa tanggung jawab serta nantinya ikut memelihara hasil-hasil atau upaya pemberdayaan yang telah dilakukan berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Iriawan & Edyanto, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan EP merupakan kepala seksi kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa;

".....Kalau pemberdayaan masyarakat nelayan asli Papua setiap tahun kami laksanakan mulai dari alat bantu penangkapan seperti kapal penangkap ikan, jaring, bahkan sampai di darat lagi kami bantu dengan cool box dan freezer, setelah pendampingan pelatihan pengolahan ikan sampai pada pemasaran. Cuma kami melihat kesadaran masyarakat untuk ikut pendampingan setelah pelatihan masih kurang mungkin karena sumber daya alam yang melimpah jadi mereka kadang malas untuk melanjutkan pendampingan, padahal itu sangat penting sekali bagi mereka". (Hasil wawancara 19 September 2022).

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan informan D yang merupakan staf dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa:

".....Pemberdayaan sudah dilakukan, cuma saya melihat motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masih kurang padahal sumberdaya alam itu melimpah disini jadi hasil tangkapan nelayan juga melimpah". (Hasil wawancara 19 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa masyarakat masih kurang motivasi dalam berpartisipasi dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor. Sebagai pelaku, masyarakat sendiri yang akan memainkan peran dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Adapun pemerintah hanya menjadi pelengkap dan penunjang dalam menentukan aturan dasar dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai partisipan, masyarakat hendaknya lebih berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Masyarakat haruslah berusaha menyusun kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme pendekatan dari bawah ke atas. Disamping itu, masyarakat haruslah aktif dalam kegiatan yang telah direncanakan.

Menurut Salatan et al (2018) salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat adalah kesadaran masyarakat. Lebih lanjut, dalam pemberdayaan masyarakat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk mau ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan yang dilakukan (Hasim, 2021).

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa strategi dalam pemberdayaan wanita nelayan asli Papua di kabupaten Biak Numfor dilakukan melalui; penyediaan sarana dan prasarana *home industri*, pemberian pelatihan keterampilan olahan ikan, dan pembentukan kelompok ibu-ibu nelayan. Disamping itu, terbatasnya anggaran dan kesadaran masyarakat yang masih kurang merupakan faktor penghambat dalam pemberdayaan wanita nelayan asli Papua di kabupaten Biak Numfor.

## Daftar Pustaka

- Aflandari, C. I., Samsudin, S., & Marsudi, E. (2018). Strategi Pemberdayaan Wanita Nelayan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Nelayan di Gampong Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 3(4), 262–269. <https://doi.org/10.17969/jimfp.v3i4.9513>
- Agustini, N. W. S., & Adikampana, I. M. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Proses Pengembangan Ekowisata Taman Sari Buwan Di Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali. *Destinasi Pariwisata*, 2(1), 46–56.
- Christofer Ondang, Frans Singkoh, N. K. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Kasus Di Dinas Koperasi Dan UKM). *Eksekutif*, 3(3), 1–10.
- Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, I. H. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(4).
- Edyanto, Karsiman. (2019). Peran Muhammadiyah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kokoda Di Kota Sorong. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1), 23–33. <https://doi.org/10.33506/jn.v4i1.360>
- Firmansyah, R., & Pratiwi, Ratih Nur, R. (2014). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Madiun ( Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Ma. *Jurnal Administarasi Publik*, 2(1), 154–160.
- Hasim, D. (2021). Peranan Dinas Perikanan Biak Numfor Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan Di Kabupaten Biak Numfor. *Gema Kampus*, 16(1), 1–9.
- Hermanto, L. (2017). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Sosial Masyarakat Nelayan Berbasis Komunitas Ibu Rumah Tangga Di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 160–188. <https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2017>
- Iriawan, H., & Edyanto, E. (2022). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Noken di Kelurahan Fandoi. *Sosio E-Kons*, 14(2), 183–187. [https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio\\_ekons/article/view/12954](https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons/article/view/12954)

- Irwan, W., Susanti, A., Kornelius, Y., & Putra, F. H. A. (2017). Studi Tentang Strategi Pemberdayaan Nelayan di Pesisir Pantai Teluk Tomini Dalam Upaya Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Parigi Moutong. *Prosiding Seminar Nasional KSP2K II*, 2(1), 73–88.
- Lopulalan, J. E. (2018). Jati Diri Orang Asli Papua Dalam Pusaran Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(1), 37–49. <https://doi.org/10.21831/socia.v15i1.20801>
- Mastika, I. K. (2018). Pengembangan Ekowisata Berwawasan Kearifan Lokal Di Wilayah Eks Karesidenan Besuki, Jawa Timur. *Jurnal Master Pariwisata*, 4(2), 240–252. <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2018.v04.i02.p06>
- Misno. (2015). Manfaat Alokasi Dana Desa bagi Masyarakat Desa ( Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ). *Perspektif*, 8(2), 539–547.
- Musa. (2017). Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Mawa'izh*, 8(1), 107–125. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v8i1.700107](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32923/maw.v8i1.700107)
- Ras, A. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Socius*, 14(10).
- Safri Miradj, S. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Melalui Proses Pendidikan Nonformal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1).
- Salatan, S., Manoppo, V. E. N., & Darwisito, S. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Soma Pajeko Di Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 13(1), 87. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v13i1.6851>
- Setiawan, H. D. (2020). Strategi Pemberdayaan Nelayan Kecil Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 41(67), 7821–7846.
- Sinaga, H. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Untuk Meningkatkan Kesejahteraannya Di Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga. *Tapian Nauli*, 1(1), 1–13.
- Suryadi, A. M., & Sufi. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara). *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(2), 118–140. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/na/article/view/3062>
- Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 15–27.